

MAKALAH
MODEL/PENDEKATAN KEBIJAKAN PUBLIK

Tugas Mata Kuliah Kebijakan Publik

Dosen Pengampu : Dr. Ani Agus Puspawati, S. AP., M. AP.



Disusun Oleh

KELOMPOK 6 REGULER C

- | | |
|-------------------------------------|---------------------|
| 1. Deva Adelia Sanjaya | (2316041106) |
| 2. Amanda Novelasari | (2316041089) |
| 3. Rr Indah Rizqi Cahyandari | (2316041107) |
| 4. Amelda Shalsabila Putri | (2316041080) |
| 5. Christila Oktaria | (2316041082) |

ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG

2024

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Semesta Alam, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas kelompok ini dengan judul "Model/Pendekatan Kebijakan Publik" dari Dosen Pengampu Dr. Ani Agus Puspawati, S. AP., M. AP. . Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulisan makalah ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Kebijakan Publik dan untuk menambah wawasan serta pengetahuan tentang Model/Pendekatan Kebijakan Publik, khususnya tentang menguraikan dan membandingkan pendekatan itu sendiri dalam analisis kebijakan publik. Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi perbaikan makalah ini di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat menambah pengetahuan tentang model/pendekatan kebijakan publik

Bandar Lampung

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penulisan	2
BAB II PEMBAHASAN.....	3
2.1 Macam-Macam Model Kebijakan	3
2.2 Membandingkan Pendekatan dalam Analisis Kebijakan Publik	8
2.3 Contoh Dari Model/Pendekatan Kebijakan Publik.....	10
BAB III PENUTUP.....	13
3.1 Kesimpulan.....	13
DAFTAR PUSTAKA	iv

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Model adalah representasi sederhana dari dunia nyata. Model dirumuskan oleh Mustopadidjaja (dalam Sri Suwitri, 2008) sebagai penyederhanaan realitas permasalahan yang dihadapi, yang dinyatakan dalam kesetaraan kausalitas atau fungsionalitas dan menciptakan model tersebut sebagai representasi yang disederhanakan dari permasalahan aktual yang dihadapi, yang disajikan dalam narasi yang relevan dengan kausalitas dan fungsi.

Model memudahkan untuk mempelajari sesuatu. Misalnya, jika seorang anak ingin memperkenalkan calon istrinya kepada orang tuanya, ia perlu mendapat gambaran tentang status calon istrinya. Kondisi fisik, status perkawinan, agama, kepribadian, latar belakang keluarga. Model merupakan representasi abstrak dari realitas calon istri itu menurut Yaw, n.d (dalam Dian Suluh Kusuma Dewi, 2022)

Model juga memudahkan mempelajari kebijakan publik. Model merupakan alat yang membantu dalam perumusan dan perancangan kebijakan publik. Keuntungan menggunakan model adalah memudahkan deskripsi struktural masalah dan membantu memprediksi akibat ada tidaknya perubahan akibat faktor sebab akibat. (Sri Suwitri, 2008)

Kebijakan mengacu pada apa yang dilakukan pemerintah. Dalam konteks ini, Dye (dalam Eko Handoyo, 2012) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “whatever government choose to do or not to do” Kebijakan publik adalah apa yang pemerintah putuskan untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Kebijakan Publik didefinisikan sebagai rasionalisasi untuk menentukan apakah akan membuat keputusan atau tindakan tertentu untuk mencapai tujuan kebijakan tertentu merupakan fokus kebijakan publik.

Kebijakan publik merupakan salah satu kajian paling menarik dalam ilmu politik. Namun, konsep kebijakan publik mendapat penekanan lebih besar dalam studi administrasi negara. Dengan kata lain, kebijakan publik dipandang hanya sebagai suatu proses pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh negara dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Secara umum kebijakan publik dapat diartikan sebagai kebijakan atau keputusan yang diambil oleh suatu otoritas, dalam hal ini pemerintah, dan dapat melibatkan pemangku

kepentingan lain yang mempengaruhi masyarakat, sehingga proses pengambilan kebijakan selalu berlangsung mulai dari formulasi hingga evaluasi. Dari sudut pandang politik, kebijakan publik dapat dilihat sebagai salah satu hasil perdebatan jangka panjang antara aktor-aktor yang mempunyai kepentingan berbeda di ranah nasional. Oleh karena itu, kebijakan publik tidak hanya menganalisis proses pengambilan kebijakan tetapi juga dinamika yang terjadi ketika kebijakan dibuat dan diimplementasikan.

Dalam makalah ini, penulis membahas bagaimana berbagai model pendekatan kebijakan publik dapat memengaruhi praktik tata kelola. Dengan memahami kekuatan dan kelemahan masing-masing model, kami berharap dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat kepada para pembuat kebijakan untuk mengembangkan kebijakan yang lebih efektif dan efisien. Selain itu, makalah ini dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi para akademisi dan masyarakat umum untuk memahami bagaimana kebijakan publik beroperasi dalam praktik dan mengapa penting bagi mereka untuk mengembangkan solusi yang dapat diandalkan untuk isu-isu terkini.

1.2 Rumusan Masalah

- 1) Apa saja model/pendekatan kebijakan publik?
- 2) Bagaimana perbandingan pendekatan dalam analisis kebijakan publik?
- 3) Apa saja contoh model/pendekatan ?

1.3 Tujuan Penulisan

- 1) Untuk menguraikan beberapa model/pendekatan kebijakan publik
- 2) Untuk membandingkan pendekatan dalam analisis kebijakan publik
- 3) Untuk mengetahui contoh dari model/pendekatan kebijakan publik

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Macam-Macam Model Kebijakan

Pada dasarnya, model hanya mewakili gambaran teoritis realitas yang disederhanakan. Contohnya adalah konsep atau diagram yang menyederhanakan realitas menjadi model. Namun, hal ini tidak berlaku untuk teori yang validitasnya telah dikonfirmasi oleh eksperimen empiris. Dasar dari hal ini adalah isomorfisme, yang merujuk pada kesamaan antara dua realitas. Sebuah model empiris dapat didefinisikan sebagai hasil dari isomorfisme antara dua atau lebih teori yang berbeda, karena merupakan isomorfisme antara dua atau lebih teori empiris, seringkali lebih sulit guna menguji kebenaran isi model di lapangan. Sekalipun model tersebut belum merupakan teori empiris, namun dapat dijadikan sebagai dasar yang sangat berguna bagi penelitian, terutama penelitian yang bertujuan untuk penyelidikan lebih lanjut atau penelitian atau penemuan baru. (Faried, 2012)(dalam Dian Suluh Kusuma Dewi, 2022)

Penelitian kebijakan publik dapat memperoleh manfaat besar dari penggunaan model. Banyak faktor yang menyebabkan hal ini. Pertama, kebijakan publik merupakan proses yang sangat komplikatif. Oleh karena itu, jenis model yang menyederhanakan realitas sangat berguna dalam memahami realitas yang kompleks. Elemen yang akan lebih sederhana jika ada model untuk menganalisis kebijakan publik, dan lain-lain. Kemampuan untuk mengidentifikasi variabel yang dapat memengaruhi proses implementasi kebijakan adalah menguntungkan. Selain itu, penggunaan model untuk menjelaskan kebijakan publik sangatlah bermanfaat dalam konteks ini. Artinya, Pendekatan ilmiah manusia tidak mampu memahami realitas yang kompleks tanpa terlebih dulu menyederhanakannya.

Memperoleh pengetahuan tentang model-model kebijakan publik yang lazim digunakan oleh negara, lembaga, dan organisasi dalam pengambilan keputusan juga diperlukan. Menurut buku Thomas R. Dye yang berjudul *Understanding Public Policy* (1995) (dalam Intan Fitri Meutia, 2017), setidaknya ada sembilan model kebijakan publik, yakni:

A. Model Kelembagaan

Model kelembagaan menekankan kemampuan pemerintah untuk memengaruhi kebijakan publik. Kebijakan publik adalah dasar bagi semua tindakan pemerintah. Tanggung jawab untuk merumuskan kebijakan berada di tangan lembaga pemerintah, yang independen dari pengaruh eksternal apa pun.

Model kebijakan publik ini memiliki beberapa karakteristik, antara lain pemerintah dapat menjamin legitimasi kebijakan yang diambilnya, dan kebijakan yang diambilnya dapat bersifat universal yaitu dapat diterapkan pada semua kelas sosial. Terakhir, kebijakan yang diambil pemerintah dapat memonopoli seluruh kekuasaan rakyat karena dapat memberikan sanksi atas pelanggaran kebijakan tersebut. Model ini juga mempunyai kelemahan karena ilmu politik tidak membahas hubungan antara institusi negara dan isi kebijakan publik.

B. Model Proses

Aktivitas politik dimodelkan sebagai suatu proses dalam model teori proses pembuatan kebijakan publik. Menurut model ini, formulasi kebijakan publik merupakan proses politik yang melibatkan berbagai tindakan. Model ini menyatakan bahwa formulasi kebijakan publik melibatkan serangkaian tindakan :

- a. Mengidentifikasi permasalahan yang memerlukan intervensi pemerintah,
- b. Penataan agenda perumusan kebijakan, yang mengarah pada identifikasi permasalahan yang perlu ditangani secepat mungkin dan melalui permasalahan tema tersebut dapat diatasi guna menemukan langkah penyelesaiannya,
- c. Perumusan usulan kebijakan sehubungan dengan upaya penyelesaian masalah,
- d. Legitimasi politik, yang bertujuan untuk menentukan suatu usulan diantara sekian banyak usulan penyelesaian masalah,
- e. Implementasi kebijakan, yang fokus pada pengorganisasian birokrasi dan pemberian layanan terkait implementasi kebijakan, dan
- f. evaluasi kebijakan dari segi hasil dan evaluasi hasil dan kebijakan yang dilaksanakan.

Rangkaian kegiatan ini merupakan serangkaian proses yang direncanakan dalam model perumusan kebijakan ini.

C. Model Kelompok

Model kelompok mengasumsikan bahwa individu dengan kepentingan bersama mengorganisasikan diri mereka untuk membentuk kelompok yang dapat memengaruhi keputusan dan kebijakan pemerintah. Sasaran kelompok-kelompok yang bersaing didasarkan pada ambisi mereka sendiri, dan mereka berusaha untuk saling memengaruhi dan menerapkan kebijakan yang mereka inginkan. Misalnya membentuk koalisi antar partai politik dan memberikan pengaruh yang kuat kepada pemerintah melalui koalisi besar. Model ini memiliki kelebihan dalam menyediakan platform, seperti membentuk partai politik terorganisasi untuk mengekspresikan tujuan individualistis para anggotanya, tetapi juga kekurangan dalam mendorong tumpang tindih dalam kelompok yang terintegrasi.

D. Model Elite

Pendekatan terhadap kebijakan publik yang dikenal sebagai model elit melibatkan asumsi bahwa kebijakan publik diadopsi oleh mereka yang berkuasa dalam kelompok elit masyarakat. Model elit mempunyai dampak positif dan negatif. Meskipun memiliki dampak positif karena kebijakan yang dibuat oleh orang-orang terpercaya dapat menguntungkan negara, namun efek negatifnya berasal dari kegagalan elit yang sering kali tidak melaksanakan kebijakan sesuai kebutuhan masyarakat. Akibatnya, model ini kurang baik karena tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat. Model ini biasanya membentuk pemerintahan konservatif dan mempertahankan status quo.

E. Model Rasional

Teori ini beranggapan bahwa pemerintah harus memiliki kemampuan untuk merancang kebijakan yang menguntungkan masyarakat. Proses pengambilan kebijakan melalui model teori rasional ini menekankan pada peran pembuat kebijakan agar dapat menghadapi permasalahan yang ada untuk menemukan ide terbaik dari kebijakan tersebut yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

Ehezkel Dror, seorang pendukung model rasional-komprehensif, menegaskan bahwa semua pembuat kebijakan harus :

- 1) Memahami semua prinsip penting masyarakat.
- 2) Memahami setiap usulan kebijakan yang tersedia.
- 3) Memahami implikasi dari setiap keputusan politik.
- 4) Mengevaluasi hubungan antara tujuan dan nilai-nilai sosial yang dikorbankan dalam setiap alternatif kebijakan.
- 5) Memilih alternatif politik yang paling efisien.

Dari semua karakteristik dan persyaratan untuk memenuhi profil pembuat kebijakan model rasional komprehensif, terdapat banyak kritik, namun kritik paling keras datang dari Charles E. Lindblom, seorang pendukung Teori Intermental. Para kritikus mengatakan model yang rasional dan komprehensif memiliki banyak kendala dan kekurangan, seperti :

- 1) Anggota tidak selalu setuju dengan nilai-nilai tertentu.
- 2) Tidak jarang nilai-nilai bertentangan.
- 3) Lingkungan pembuat kebijakan yang jauh dari masyarakat.
- 4) Pembuat kebijakan hanya mengutamakan kepentingan individu atau kelompok.
- 5) Terkadang, opsi alternatif dipilih untuk memfasilitasi pemecahan masalah tanpa mempertimbangkan solusi terbaik jangka panjang, atau pembuat kebijakan dapat memilih solusi jangka pendek yang tidak dirancang untuk bertahan lama.
- 6) Ada tekanan dari luar, misalnya dari investor yang berkepentingan dengan bidang tersebut.
- 7) Kendala dalam pengumpulan data/informasi.
- 8) Kurangnya sumber daya manusia bagi pengambil kebijakan.
- 9) Ketidaktepatan perhitungan rasio keuntungan dan biaya, dan;
- 10) Berbagai macam halangan dalam bentuk tantangan dari diri pembuat kebijakan itu sendiri atau birokrasi yang ketat sehingga tidak bias mengambil kebijakan yang rasional.

F. Model Inkremental

Inkremental sendiri mengacu pada kebijakan yang berubah seiring berjalannya waktu. Model kebijakan publik ini mempertimbangkan kelanjutan kegiatan pemerintah yang ada dan penambahan atau modifikasi kegiatan tersebut secara bertahap. Model ini diciptakan berdasarkan kritik terhadap model rasional komprehensif.

Model inkremental memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Pilihan nilai dan tujuan, di satu sisi, dan analisis empiris atas tindakan yang diperlukan, di sisi lain, tidak terpisah satu sama lain, tetapi saling berhubungan.
- b. Karena sarana dan tujuan tidak dapat dipisahkan, analisis sarana dan tujuan seringkali tidak akurat atau terbatas.
- c. Jika banyak pengambil kebijakan secara langsung menyetujui kebijakan yang diambil (walaupun mereka tidak sepakat mengenai cara yang digunakan untuk

mencapai tujuan tersebut), kebijakan tersebut dapat dianggap sebagai kebijakan yang “baik”.

- d. Analisis ini dibatasi secara signifikan dengan mengabaikan hal-hal berikut:
1. kemungkinan tercapainya hasil terbaik/sempurna;
 2. Alternatif Kebijakan Paling Potensial
 3. nilai-nilai yang paling berpengaruh, dan
 4. Peran teori direduksi menjadi serangkaian kegiatan yang membandingkan kebijakan yang ada dan kebijakan baru.

G. Model Pilihan Publik

Teori ini beranggapan bahwa setiap kebijakan pasti merupakan pilihan masyarakat, pengguna kebijakan tersebut. Artinya, dalam model teoritis ini, proses pengambilan kebijakan diasumsikan melibatkan masyarakat melalui berbagai kelompok kepentingan untuk membantu pengambil kebijakan dalam merumuskan kebijakan. Pendekatan model pengambilan kebijakan ini lebih umum digunakan pada semua instrumen kebijakan yang terkait dengan proses pemilu.

H. Model Sistem

Teori sistem yang dikemukakan oleh Dye sebagai model perumusan kebijakan, mengakui tiga elemen penting perumusan kebijakan: input, proses, dan output. Input mengacu pada berbagai informasi yang diperoleh dalam konteks permasalahan publik. Berdasarkan informasi tersebut, dilakukan proses pengambilan kebijakan untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut. Pada tahap output, suatu kebijakan didefinisikan sebagai hasil proses dan kemudian diimplementasikan sebagai solusi terhadap permasalahan. Ketiga komponen tersebut membentuk suatu sistem terpadu yang dapat diterapkan dalam praktik sehingga menghasilkan kebijakan yang berguna untuk menyelesaikan permasalahan publik.

I. Model Demokrasi

Melalui pendekatan model ini, pengembangan kebijakan menekankan pentingnya semua pihak berhak atas hak-hak demokrasi saat mereka berpartisipasi dalam membentuk kebijakan. Penting untuk mempertimbangkan sudut pandang masyarakat saat menyusun kebijakan, sehingga hasilnya dapat menjadi keputusan kolaboratif antara pembuat kebijakan dan publik.

Sembilan model pengambilan kebijakan yang diberikan oleh Dye merupakan proses alternatif untuk menyelesaikan permasalahan publik, sehingga memungkinkan pembuat kebijakan untuk memutuskan model yang memenuhi kebutuhan pengambilan kebijakannya. Penggunaan model pengembangan kebijakan tertentu diperlukan bagi para pembuat kebijakan untuk memahami kelebihan dan kekurangannya.

2.2 Membandingkan Pendekatan dalam Analisis Kebijakan Publik

Model	Fokus Utama	Karakteristik	Kelebihan	Kekurangan
Rasional	Optimalisasi, memaksimalkan keuntungan masyarakat dan meminimalkan biaya	Pemerintah harus memilih kebijakan yang memberikan manfaat optimum bagi masyarakat. Pembuat kebijakan harus memahami prinsip penting masyarakat, usulan kebijakan, implikasi keputusan politik, dan evaluasi hubungan antara tujuan dan nilai-nilai sosial	kebijakan yang akan dilahirkan sesuai dengan kondisi dilapangan	keterbatasan rasional intelektual dari sipembuat kebijakan
Inkremental	Kelanjutan kegiatan pemerintah dan modifikasi kegiatan secara bertahap	Kebijakan yang dianggap baik jika banyak pengambil kebijakan secara langsung menyetujui kebijakan tersebut	kebijakan yang dilahirkan lebih cepat karena kebijakan yang dilahirkan merupakan kebijakan yang dianggap paling tepat tanpa memikirkan alternatif lainnya	kebijakan hanya dapat diterapkan pada permasalahan yang bersifat rutin
Pilihan Publik	Peran masyarakat atau kebijakan sebagai pilihan masyarakat	Proses pengambilan kebijakan melibatkan masyarakat melalui berbagai kelompok kepentingan untuk membantu pengambil kebijakan dalam merumuskan kebijakan	Memungkinkan aspirasi masyarakat terwakili dalam kebijakan yang diambil.	Dapat dipengaruhi oleh kepentingan kelompok tertentu, mengabaikan suara minoritas.
Sistem	Tiga elemen penting perumusan kebijakan: input, proses, dan output	Input berupa informasi yang diperoleh dalam konteks permasalahan publik. Proses pengambilan kebijakan untuk mencari solusi atas permasalahan.	memiliki input dan proses yang jelas dan sesuai prosedur sehingga menghasilkan output yang jelas	membutuhkan waktu yang banyak dalam menampung input dan melaksanakan proses sebelum dilahirkannya kebijakan

		Output sebagai hasil proses yang diimplementasikan sebagai solusi		
Demokrasi	Partisipasi masyarakat	Mempertimbangkan sudut pandang masyarakat saat menyusun kebijakan untuk menghasilkan keputusan kolaboratif antara pembuat kebijakan dan publik	Meningkatkan legitimasi dan akuntabilitas kebijakan melalui partisipasi luas	Proses bisa menjadi kompleks dan sulit diimplementasikan secara efektif
Kelembagaan	Peran lembaga-lembaga resmi, seperti pemerintah, parlemen, lembaga yudisial, dan lembaga-lembaga administratif dalam proses kebijakan.	- Model ini menitikberatkan pada proses formal dan aturan yang diatur oleh institusi-institusi resmi. - Kebijakan dianggap sebagai hasil dari interaksi berbagai lembaga resmi dengan kewenangan yang berbeda-beda.	Model ini memberikan kepastian dan legalitas yang jelas karena kebijakan yang dihasilkan melalui lembaga resmi biasanya memiliki dasar hukum yang kuat.	Proses formal yang terstruktur sering kali mengakibatkan kebijakan bergerak lambat karena banyaknya prosedur yang harus dilalui, sehingga tidak responsif terhadap perubahan kondisi yang cepat.
Proses	Berfokus pada tahapan-tahapan yang dilalui dalam pembuatan kebijakan publik, mulai dari identifikasi masalah hingga evaluasi dan implementasi. Fokus utamanya adalah memahami bagaimana kebijakan dibuat, diterapkan, dan diubah melalui rangkaian proses formal dan informal.	- Kebijakan dipandang sebagai rangkaian proses yang terdiri dari berbagai tahap, seperti perumusan, adopsi, implementasi, evaluasi, dan modifikasi kebijakan. - Model ini memberikan panduan langkah demi langkah mengenai urutan proses yang harus dilalui dalam membuat kebijakan.	- Membantu memahami proses kebijakan yang kompleks melalui tahapan yang lebih mudah diikuti. - Memberikan pemahaman yang sistematis mengenai urutan logis dalam pembuatan kebijakan.	- Pendekatan yang terlalu kaku terhadap tahapan proses sering kali tidak realistis, karena kebijakan sering kali tidak mengikuti urutan tahapan yang tetap. - Model ini cenderung kurang memperhatikan dinamika politik dan sosial yang kompleks, yang bisa memengaruhi kebijakan di setiap tahap.
Kelompok	Model ini fokus pada bagaimana kelompok-kelompok berkepentingan berinteraksi dan bersaing untuk	- Banyak kelompok dengan berbagai kepentingan terlibat dalam proses kebijakan. - Ada dinamika persaingan antar kelompok untuk mempengaruhi pengambil kebijakan.	Model ini mampu mencerminkan pluralitas kepentingan di dalam masyarakat, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat lebih mencakup	Kelompok yang lebih kuat, baik secara finansial maupun politik, bisa lebih berpengaruh, sehingga kebijakan yang dihasilkan bisa lebih condong kepada

	mempengaruhi kebijakan publik.		berbagai sudut pandang.	kepentingan kelompok-kelompok ini.
Elite	Model ini berfokus pada peran dan pengaruh kelompok elite (misalnya, pejabat pemerintah, pemimpin bisnis, militer, atau intelektual) dalam proses pembuatan kebijakan publik.	Keputusan kebijakan diambil oleh kelompok elite, dengan sedikit atau tanpa keterlibatan masyarakat umum.	Proses pengambilan keputusan bisa lebih cepat karena tidak melibatkan banyak aktor atau proses deliberatif yang panjang.	Model ini sering dikritik karena mengabaikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat luas, yang dapat menyebabkan ketidakpuasan dan protes.

2.3 Contoh Dari Model/Pendekatan Kebijakan Publik

a. MODEL KELEMBAGAAN

CONTOH : Kebijakan Kelembagaan Berbasis Akuntabilitas menegaskan bahwa pertanggungjawaban dan transparansi sangat penting untuk organisasi swasta maupun publik. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap keputusan dan tindakan yang diambil oleh lembaga dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak yang terlibat, termasuk publik. Salah satu contohnya adalah penerapan sistem pengawasan internal dan eksternal.

b. MODEL PROSES

CONTOH : Pemerintah kota sedang mengembangkan rencana baru untuk menangani masalah parkir liar. Data mereka dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti dinas perhubungan, polisi, dan masyarakat. Peningkatan penegakan hukum, area parkir tambahan, dan sanksi bagi pelanggar adalah beberapa dari kebijakan yang diusulkan.

c. MODEL KELOMPOK

CONTOH: Kebijakan Perlindungan Lingkungan. Tujuannya adalah untuk mendorong peraturan yang lebih ketat yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan, pengurangan emisi karbon, atau pelestarian hutan. Strateginya adalah melalui kampanye kesadaran lingkungan, petisi publik, dan mendorong pemerintah untuk mengesahkan kebijakan ramah lingkungan.

d. MODEL ELITE

CONTOH: Kaum borjuis adalah kelompok kebangsawanan tertinggi di Perancis selama pemerintahan Louis XIV. Ini adalah elit yang membuat kebijakan publik dan mempengaruhi Louis XIV untuk menetapkannya, yang hanya memperhatikan kepentingan elit tersebut.

e. MODEL RASIONAL

CONTOH: Pemerintah akan meningkatkan produksi beras sebuah kecamatan. Model ini akan melihat berbagai elemen yang berkontribusi pada peningkatan produksi beras. Ini termasuk pupuk, bibit unggul, irigasi, ketersediaan lahan pertanian, upah buruh tani, cuaca, dan penyediaan pestisida. Untuk mempertimbangkan efisiensi, keuntungan, dan kerugian, masing-masing elemen akan dilihat dari sudut pandang tertentu. Suatu kebijakan yang mengurangi risiko kerugian dan inefisiensi akan memberikan alternatif.

f. MODEL INKREMENTAL

CONTOH: Penggajian pegawai adalah masalah umum, serta penyusunan anggaran belanja (APBD atau APBN). Anggaran sebelumnya hanya memungkinkan kenaikan. Namun, dengan sedikit perubahan dari kebijakan sebelumnya, penyusunan anggaran dan penggajian pegawai tidak dapat lagi ditetapkan ketika terjadi krisis moneter. Pada masa krisis moneter di Indonesia, penyusunan anggaran mengalami perubahan drastis serta kenaikan gaji pegawai. Akibatnya, tunjangan krisis bagi pegawai negeri dan pejabat naik hingga 2.000 persen.

g. MODEL PILIHAN PUBLIK

CONTOH: Privatisasi layanan publik seperti transportasi, layanan pos, dan layanan kesehatan. Tujuan privatisasi adalah untuk meningkatkan efisiensi pemerintah dengan memberikan pengelolaan layanan kepada sektor swasta, yang biasanya didorong oleh insentif pasar untuk menyediakan layanan yang lebih baik dengan harga yang lebih rendah.

h. MODEL SISTEM

CONTOH: Sistem Pelayanan Kesehatan Universal mencakup berbagai fasilitas kesehatan dari tingkat pertama hingga tersier dan memberikan akses kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat melalui sistem asuransi kesehatan nasional. Hasilnya adalah peningkatan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, pengurangan biaya kesehatan bagi masyarakat, dan peningkatan kualitas kesehatan nasional.

i. MODEL DEMOKRASI

CONTOH: Anggaran Partisipatif Ini adalah model kebijakan di mana warga langsung terlibat dalam pengambilan keputusan tentang bagaimana anggaran publik dialokasikan. Salah satu contohnya adalah kota Porto Alegre di Brasil, di mana warga lokal diberi kesempatan untuk menentukan prioritas anggaran untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, fasilitas kesehatan, dan sekolah.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Kebijakan publik merupakan keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam prosesnya. Ada sembilan model utama, yakni model kelembagaan, proses, kelompok, elit, rasional, bertahap, pilihan publik, sistem, dan demokratis. Masing-masing model memiliki karakteristik, kekuatan, dan kelemahan unik yang berdampak pada keputusan kebijakan publik. Penulis menekankan pentingnya memahami masing-masing model agar pengambil kebijakan dapat membuat kebijakan yang lebih efektif dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Makalah ini juga berfungsi sebagai panduan untuk mendorong akademisi dan masyarakat umum memahami dinamika kebijakan publik dan berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan. Pemahaman yang lebih mendalam terhadap model-model tersebut diharapkan dapat membantu menyelesaikan permasalahan publik dengan lebih efisien dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, D. S. K. (2022). Buku Ajar Kebijakan Publik Proses, Implementasi dan Evaluasi.
- Handoyo, E. (2012). Kebijakan publik. Semarang: Widya Karya, 323.
- Marsari, H., Hairani, S., & Gistituati, N. (2021). Model perumusan kebijakan pendidikan. JRTI (Jurnal Riset tindakan indonesia), 6(1), 89.
- Meutia, I. F. (2017). Analisis kebijakan publik.
- Pratama, D. P., Putera, R. E., & Koeswara, H. (2022). Analisis Formulasi Kebijakan Penanggulangan Pandemi Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 13(2).
- Septiana, A. R., Bormasa, M. F., Alalsan, A., Mustanir, A., Wandan, H., Razak, M. R. R., ... & Seran, D. A. N. (2023). Kebijakan Publik: Teori, Formulasi Dan Aplikasi. Global Eksekutif Teknologi.
- Suwitri, S. (2008). Konsep dasar kebijakan publik. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.